

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan wadah kehidupan yang mencakup ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk didalamnya tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya, yang merupakan suatu keadaan kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara keberlangsungan hidupnya.(Sujarto, 1992)

Pengertian Tata Ruang menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan pengertian kota, ditinjau dari segi geografis menurut Bintarto (1989), kota dapat diartikan suatu sistem jaringan kehidupan manusia, ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di bawahnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, komprehensif, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan

perkotaan, merupakan bagian dari pembangunan nasional, harus berlandaskan keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materil dan spiritual, jiwa dan raga serta individu dan masyarakat.(Nurwino,2016)

Perkembangan politik perencanaan di tanah air berujung pada mandeknya karya perencanaan ruang yang bisa dianggap sebagai terobosan dalam pemanfaatan ruang, maupun perubahan peruntukan ruang di Indonesia. Satu dekade diberlakukannya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyisakan banyak pertanyaan. Terutama tentang kualitas produk rencana tata ruang, keterbatasan biaya perencanaan, dan miskinnya kognisi dalam dinamika 3 aspek proses merencana, yaitu teknoratis, partisipatif, dan legislatif. Pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar terhambat karena konflik ruang. Proyek-proyek strategis bertabrakan dengan produk rencana di level nasional dan lokal.(Kompas.com,2020)

Kota sebagai pusat perekonomian wilayah memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya melahirkan berbagai permasalahan. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan dikaitkan dengan implikasinya pada ruang kota, bagi para pakar dan pemerhati lingkungan sangatlah menakutkan. Apalagi ada banyak kejadian terutama di negara berkembang, kota-kota tersebut berkembang tanpa pengendalian. Jumlah

penduduk terus bertambah, ruang kota semakin padat dan berkualitas rendah, lalu lintas semrawut, penghijauan sangat kurang, terjadi banjir dan sebagainya.

Kondisi kota-kota di negara berkembang, semakin hari semakin terpuruk. Meskipun, ada gejala ekonomi kota meningkat, padahal di balik itu tingkat stres warga sangatlah tinggi, jumlah orang yang sakit terus saja bertambah, jumlah penduduk dengan kualitas tinggi terus menurun, dan pada akhirnya, kota yang katanya mengalami kemajuan ekonomi itu mengalami kemunduran dalam berbagai hal.

Umumnya kota-kota besar banyak mengalami permasalahan tata ruang, tidak saja karena kota sejak awal telah dibangun dan bertumbuh secara alami, akan tetapi kota mengalami pertumbuhan lebih pesat, yang biasanya selalu lebih cepat dari konsep tata ruang yang diundangkan karena cepatnya laju pembangunan di perkotaan. Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya akan berakibat pada padatnya penduduk di suatu wilayah yang akan berimbas pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal. (Nurwino, 2016)

Pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi merupakan salah satu permasalahan yang umumnya terjadi di daerah perkotaan. Dampak langsung yang dihadapi oleh pemerintah kota adalah keterbatasan lahan yang tersedia bagi penduduk, akibatnya persaingan untuk mendapatkan tempat tinggal menjadi masalah tersendiri.

Pemukiman dan perumahan merupakan kebutuhan utama/primer yang harus dipenuhi oleh manusia. Perumahan dan pemukiman tidak hanya dapat dilihat sebagai

sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih jauh adalah proses bermukim manusia dalam rangka menciptakan suatu tatanan hidup untuk masyarakat dan dirinya dalam menampakkan jati diri.

Untuk selanjutnya dalam rangka untuk peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan dan pemukiman, serta meningkatkan efektifitas dalam penggunaan tanah terutama pada lingkungan/daerah yang padat penduduknya, maka perlu dilakukan penataan atas tanah sehingga pemanfaatan dari tanah betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka mulai terpikirkan untuk melakukan pembangunan suatu bangunan yang digunakan untuk hunian untuk kemudian atas bangunan dimaksud dapat digunakan secara bersama-sama dengan masyarakat lainnya, sehingga terbentuklah adanya rumah susun.

Pembangunan rumah susun adalah suatu cara untuk memecahkan masalah kebutuhan dari pemukiman dan perumahan pada lokasi yang padat, terutama pada daerah perkotaan yang jumlah penduduk selalu meningkat, sedangkan tanah kian lama kian terbatas. Pembangunan rumah susun tentunya juga dapat mengakibatkan terbukanya ruang kota sehingga menjadi lebih lega dan dalam hal ini juga membantu adanya peremajaan dari kota, sehingga makin hari maka daerah kumuh berkurang dan selanjutnya menjadi daerah yang rapih,bersih, dan teratur.

Kota Palembang merupakan salah satu daerah tingkat II dalam Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah kota Palembang dibelah oleh Sungai Musi menjadi 2 bagian yaitu daerah seberang hulu dan daerah seberang hilir. Secara administrasi luas

wilayah Kota Palembang adalah 400,61 Km² dan terbagi menjadi 8 kecamatan yaitu kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Sukarame, Sako, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II.(Subagijo dan Johny,1995)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 terdapat bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun pada setiap Kabupaten/Kota. Dimana kota Palembang memiliki jumlah penduduk yang tertinggi dari setiap tahunnya yaitu pada tahun 2019 terdapat 1.843.488 penduduk (jiwa).(Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan)

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di kota Palembang dengan sendirinya akan memunculkan berbagai macam permasalahan. tingginya pertumbuhan penduduk inilah yang mengakibatkan jumlah penduduk semakin padat dan tidak sebanding dengan luas wilayah yang akan digunakan sebagai lahan tempat tinggal. Hal ini akan memunculkan berbagai masalah, salah satunya adalah masalah tempat tinggal (rumah).

Namun dengan kenaikan jumlah penduduk yang tinggi dibandingkan dengan penyediaan fasilitas umum mengakibatkan cenderung memburuknya kualitas pemukiman. Dalam rangka pengadaan pemukiman yang sehat, maka pemerintah mencoba mengurangi dampak permasalahan yang mungkin saja dapat muncul dengan mengembangkan proyek rumah tunggal, rumah susun dan program perbaikan kampung. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah dengan mengadakan proyek rumah susun yang diprioritaskan

Rusun yang dibangun sejak tahun 1984 ini berada di tengah Kota Palembang, yaitu di Jalan Radial. Permukiman ini kebanyakan dihuni warga yang masuk kategori perekonomian menengah ke bawah. Ini rupanya tidak serta merta membuat masyarakat yang tinggal disana merasakan tempat tinggal yang layak untuk ditempati. Permasalahannya bukan hanya datang dari ekonomi saja melainkan dari lingkungan, sosial dan keamanannya.

Permasalahan sampah bukan hanya terjadi dialiran sungai saja melainkan di lingkungan rumah susun pun ini menjadi masalah. Seperti di Blok 19 Rusun salah satu warga yang bernama Dasril "Lahan ini seharusnya jadi tempat parkir, tapi banyak orang luar yang membuang sampah di sini. Awalnya sedikit, tapi lama-lama menumpuk dan menjadi tempat sampah".(Liputan6.com,2019)

Selain kawasan yang mempunyai masalah dalam hal sampah, warga pun menyatakan hunian rumah susun atau rusun ilir Palembang memiliki permasalahan sosial lainnya. Beberapa warga mengaku, jika hunian rusun memang diisi oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kyai, mahasiswa, karyawan, hingga ada juga yang menggelar praktek prostitusi kelas bawah.

Sebut saja namanya Desi, warga di rusun ini menyatakan jika kawasan hunian rusun memang tidak nyaman bagi perkembangan anak-anak. "Lingkungan di sini (rumah susun) memberikan pengaruh buruk untuk pertumbuhan anak kami".

Hunian yang sudah berdiri sejak 36 tahun lalu ini, terdapat blok khusus bagi praktek prostitusi tersebut. Meski mengetahui hal tersebut, warga di rumah susun lebih bersifat tidak peduli dan tidak ingin ikut campur urusan tetangganya. "Di sini

sudah biasa melihat orang terciduk, keluar masuk penjara, kami menonton saja”.(Suarasumsel.id,2021) Karena adanya persoalan ini peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hal ini.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian tentang Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang Kota Palembang Dalam Perspektif Politik dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi, dalam hal ini yang berjudul *“Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang Kota Palembang Dalam Perspektif Politik (Studi Pada Rumah Susun Di Palembang)”*

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang Rumah Susun di Kota Palembang Dalam Perspektif Politik ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang Rumah Susun di Kota Palembang Dalam Perspektif Politik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai bahan referensi peneliti lain yang juga mengambil memperluas ilmu politik mengenai Penataan dan

Pengelolaan Tata Ruang Kota Palembang Dalam Perspektif Politik (Studi Pada Rumah Susun Di Palembang) dan juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang terkait masalah Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang Kota Palembang Dalam Perspektif Politik (Studi Pada Rumah Susun Di Palembang).

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang Kota Palembang Dalam Perspektif Politik (Studi Pada Rumah Susun Di Palembang). Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan kepada pemerintah Kota Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan tinjauan pustaka awal. Penelitian yang berkaitan dengan Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang Kota Palembang Dalam Perspektif Politik (Studi Pada Rumah Susun Di Palembang), sepanjang yang penulis ketahui belum ada. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas antara lain:

Uton Rustan Harun dalam judul *Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Dalam Otonomi Daerah* yang membahas tentang Otonomi Daerah (UU No. 22 Tahun 1999) yang mengubah paradigma pembangunan yang bersifat sentralistik menjadi

desentralistis, memberi harapan bagi orang daerah untuk memahami lebih seksama tentang manfaat penataan ruang bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kota sebagai kutub pembangunan daerah, yang menjadi panutan penataan ruang wilayah, perlu diberikan prioritas penataan yang memiliki jati diri pembangunan daerah sehingga tercipta penjalaran pola pembangunan yang tertib, terarah dan berkelanjutan keseluruh pelosok wilayahnya. Peran para “stakeholder” pembangunan kota sangat penting untuk dapat tertib dan terarahnya pertumbuhan kota sesuai dengan penataan ruangnya.

Karena itu adanya pemahaman yang sama serta komitmen yang konsisten untuk menjaga penataan kota menjadi sangat penting. Peran para “stakeholder” sebut selain harus memiliki pemahaman dan konsistensi komitmen perlu pula memahami tugas dan tanggung jawabnya yang jelas agar pengendalian tata ruang dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Eko Nugroho Saputra dengan judul *Penataan Permukiman Kumuh Dengan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Kuripan Yosorejo Kota Pekalongan* yang membahas tentang masalah yang dihadapi oleh hampir semua daerah perkotaan di negara berkembang, salah satunya pemukiman kumuh di Kota Pekalongan.

Dengan adanya masyarakat permukiman kumuh di Kota Pekalongan membuat Pemerintah Kota Pekalongan merasa prihatin, karena rumah kumuh akan membawa dampak yang sangat kompleks bagi penghuninya, baik dari segi perilaku sosialnya

maupun dari segi kesehatan penghuninya, bahkan sampai mengakibatkan dampak premanisme. Kelangkaan lahan dan harga tanah semakin mahal, di luar jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ariezki Yuliani dengan judul *Kajian Alternatif Penataan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Palembang* yang membahas tentang permukiman kumuh yang terletak di kelurahan kertapati kota palembang.

Permukiman kumuh Kelurahan Kertapati terletak di lokasi yang strategis dimana terdapat Terminal Kereta api tipe A, dekat dengan Terminal bis tipe C Karyajaya, dekat dengan pasar induk Kertapati serta dekat dengan sarana pendidikan dan perkantoran. Permukiman kumuh Kelurahan Kertapati berada pada lahan dengan status tanah ilegal dan pada RT RW Sumsel 2016 berada pada kawasan Industri.

Program relokasi permukiman kumuh di Kelurahan Kertapati ke kawasan baru di Kelurahan Ogan Baru merupakan solusi yang cukup tepat dengan pembangunan perumahan *Landed house* dan *Vertikal house* beserta sarana dan prasarana infrastruktur dan akan didapat solusi yang terbaik dalam memecahkan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Kertapati Palembang sehingga dapat menciptakan lingkungan yang tertata dan sehat sesuai dengan tatanan lingkungan yang seimbang.

Ramlah dengan judul *Evaluasi Dampak Program Rumah Susun Sewa Kelurahan Lette Kecamatan Marisso Kota Makassar* yang membahas tentang beberapa kelemahan program kebijakan dalam melelokasikan tentang evaluasi dampak program rumah susun sewa lette.

Melakukan kordinasi dengan pihak pengelola dalam hal ini UPTD Rusunawa dan juga kita akan segera melakukan rapat kerja dengan DPRD untuk memanggil pihak-pihak terkait maka melalui program rumah susun sewa Lette kecamatan Mariso Kota Makassar ini menjadi bahan pertimbangan bagi dinas yang terkait diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada.

Evaluasi dampak program rumah susun sewa lette Kecamatan Mariso Kota Makassar memiliki beberapa pengaruh yang sangat signifikan mulai dari dampak ekonomi pada indikator pemerataan, dampak politik pada indikator efektivitas serta dampak sosial pada indikator responsivitas. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian diterima karna didukung oleh nilai signifikasi. Lebih lanjut, evaluasi dampak program rumah susun sewa tersebut dipengaruhi pula oleh faktor pemerataan, efektivitas dan responsivitas.

Dewi Parliana, dkk dengan judul *Kualitas dan Pola Pemakaian Ruang Terbuka Luar Rumah Susun Sewa Sederhana Cingised* membahas tentang Peningkatan jumlah penduduk yang pesat menjadikan kebutuhan tempat tinggal

semakin meningkat namun kesediaan lahan yang terbatas menyebabkan urbanisasi dari luar kawasan perkotaan.

Selain dalam bentuk penyediaan bentuk fisik bangunan rumah susun, diperlukan penyediaan ruang yang dapat menjadi tempat untuk menghubungkan penghuni dalam berinteraksi berupa ruang terbuka yang terbentuk karena adanya kebutuhan tempat untuk bertemu, berkomunikasi, dan bermain. Dimana peraturan mengenai Ruang terbuka ini tercantum dalam Undang-Undang RI no.26 tahun 2007 mengenai Penataan Ruang serta SNI 03-7013-2004 mengenai kualitas ruang. Sebagai wahana interaksi sosial, ruang terbuka diharapkan dapat menghubungkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Aktivitas yang terjadi pada ruang terbuka dapat menjelaskan seberapa pesat dinamika kehidupan sosial masyarakat.

Melihat berbagai gambaran dari hasil penelitian terdahulu tentu ada persamaan dan perbedaan yang dapat diamati dalam penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di bahas di atas yaitu terletak adanya penetaan, pengelolaan implementasi, pola, strategi dan juga pola dalam pembahasan mengenai rumah susun tersebut. Namun perbedaan yang sangat menonjol yaitu terletak pada belum ada membahas masalah yang peneliti angkat yaitu “Penataan Dan Pengelolaan Tata Ruang Kota Palembang Dalam Perspektif Politik (Studi Pada Rumah Susun Palembang)”, melihat itu semua maka peneliti tertarik untuk melakukannya.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan seperangkat pernyataan yang sistematis, metodis, Logis dan faktual yang dikemukakan untuk menjelaskan dan memprediksi sebuah realitas. Realitas yang terdapat pada sebuah teori merupakan pemahaman subjektif manusia yang dibuat berdasarkan fakta objektif yang tersedia. Karena teori berpijak pada fakta maka sebuah teori akan sangat bermanfaat dalam menjelaskan dan menganalisis suatu gejala tertentu secara faktual.

Teori Politik Pembangunan

Konsep politik pembangunan merupakan gabungan konsep politik dan pembangunan. Warjio dalam Politik Pembangunan. Paradoks, Teori, Aktor dan Idiologi (2016) menyatakan bahwa terwujudnya politik pembangunan, tidak bisa dipisahkan oleh peran-peran kelompok atau individu tertentu. Oleh sebab itu dalam politik pembangunan akan menjawab pertanyaan siapa, apa, bagaimana dan mendapatkan apa untuk mewujudkan pembangunan yang diinginkan.

Politik Pembangunan sebagai suatu konsep yang diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara politik atau strategi atau aliran tertentu yang digunakan dalam konteks pembangunan mencapai sarannya. Cara atau strategi ini dapat dilakukan oleh negara, institusi/ organisasi ataupun partai politik dan juga oleh individu ataupun kelompok masyarakat sipil.

Dapat dikatakan bahwa pembangunan pada dasarnya adalah hasil dari proses politik yang dilakukan oleh aktor di dalamnya, pemerintah dengan perangkat lain

seperti lembaga, partai politik atau bahkan kelompok masyarakat. Aktor-aktor dalam pembangunan bukan saja berasal dari dalam negeri tetapi juga berasal dari luar negeri. Dalam artian kepentingan internasional juga memainkan peran penting dalam politik pembangunan. Variabel-variabel politik pembangunan adalah bagian-bagian dalam politik pembangunan dijalankan atau dilakukan. Keberadaan variabel politik pembangunan ini saling memengaruhi.

Dalam satu variabel akan dipengaruhi variabel-variabel lainnya. Warjio menyimpulkan bahwa variabel-variabel penting dalam politik pembangunan sebagai berikut :

1. Adanya aktor-aktor pembangunan adalah syarat mutlak dari politik pembangunan. Aktor-aktor Pembangunan adalah mereka yang mengambil peran dan menentukan dalam proses pembangunan. Aktor pembangunan memiliki naluri dan kepentingan politik dalam pembangunan melalui cara atau strategi untuk mencapai suatu tujuan.
2. kekuasaan menjadi syarat penting dalam pembangunan. Tanpa adanya kekuasaan sulit bagi individu, kelompok atau negara untuk ikut serta dalam urusan pembangunan. Dengan adanya kekuasaan tujuan pembangunan dapat dilaksanakan. Kekuasaan adalah apa yang dimiliki oleh aktor pembangunan untuk merealisasikan tujuan dari pembangunan itu baik dalam bentuk *hard power* maupun *soft power*.

3. Adanya sistem diperlukan dalam pembangunan, ini disebabkan sistem dapat menggerakkan pola yang dikehendaki dalam pembangunan. Sistem ini dapat dibentuk secara internasional maupun nasional atau lokal. Sistem adalah suatu kesatuan yang dimiliki oleh aktor pembangunan dalam merealisasikan tujuan pembangunan. Setiap sistem memiliki ciri tersendiri bagaimana pembangunan dijalankan dan bagaimana pembangunan mencapai tujuannya.
4. Adanya ideologi yang menjadi syarat mutlak dalam politik pembangunan. Ideologi menggerakkan pembangunan karena didalamnya terkandung semangat dan cita-cita. Ideologi adalah tempat menjadi gagasan dari semua aktivitas yang dilakukan oleh aktor pembangunan untuk mencapai tujuannya.
5. Intervensi asing merupakan syarat sentral dari bekerjanya politik pembangunan. Intervensi asing adalah suatu campur tangan yang berasal dari suatu kelompok, sistem ataupun negara tertentu yang berfungsi untuk mengendalikan. Pengaruh asing adalah aktor pembangunan dari luar yang mendukung rencana pembangunan yang dimainkan oleh aktor dari dalam dan memiliki tujuan-tujuan tertentu.

Motif politik pembangunan adalah sebuah keinginan dari individu atau kelembagaan/negara bagaimana ia mendapatkan, menjalankan, dan mempertahankan pembangunan yang dijalankan. Oleh karena itu, munculnya politik pembangunan tidak terlepas dari motif-motif yang mengiringinya. Setiap motif memiliki ciri-ciri sendiri. Menurut Warjio dalam Politik Pembangunan. Paradoks, Teori, Aktor dan

Ideologi (2016) ada berapa motif politik pembangunan yaitu: Motif Kekuasaan, Motif Identitas , dan Motif Aktualisasi.

1. Motif Kekuasaan adalah suatu motif yang cukup penting untuk menunjang eksistensi manusia disamping motif untuk beprestasi dan motif afiliasi/ sosial. Motif kekuasaan dalam pembangunan sebagai dorongan-dorongan aktor-aktor pembangunan untuk mengendalikan idividu atau kelompok lainnya dalam rancangan pembangunan yang telah ditetapkannya sehingga tujuan dari pembangunannya itu dapat dicapai. Keperluan untuk mengendalikan ini tentunya didasari oleh tujuan tertentu baik tujuan yang bersifat individual maupun tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat ideal ataupun berdasarkan kelompok.
2. Motif Identitas adalah sesuatu yang melekat kepada seseorang, kelompok, ataupun negara. Demikian halnya politik pembangunan juga memiliki motif identitas. Motif identitas dalam politik pembangunan adalah sesuatu yang melekat dalam diri seseorang, kelompok atau negara yang membangun untuk menunjukkan identitasnya agar identitasnya diakui dan dihargai yang hidup bersama dengan identitas-identitas lainnya.
3. Motif Aktualisasi adalah merupakan sebuah motif yang menggerakkan aktor pembangunan untuk melakukan aktivitas pembangunan karena memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk mengaktualisasikan kemampuannya untuk mencapai tujuannya atau merealisasikan impian-impianya. Wujud

motif aktualisasi sebagai usaha untuk merefleksikan kemampuan, kejayaan, harga diri kepada publik. Para penguasa, tokoh adat, pengusaha akan merefleksikan keberhasilan dari apa yang telah dicapainya dengan membangun sesuatu untuk menunjukkan kepada masyarakat.

Berdasarkan Warjio dalam Politik Pembangunan. Paradoks, Teori, Aktor dan Idiologi tersebut, peneliti menggunakan Teori pembangunan warjio karena sangat berkaitan dengan judul peneliti tentang Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang Kota Palembang Dalam Perspektif Politik (Studi Pada Rumah Susun Di Palembang) bahwasannya teori pembangunan ini sebagai teori yang akan peneliti gunakan untuk menganalisa data yang peneliti peroleh.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah sebuah upaya sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dilakukan peneliti agar dapat menjawab permasalahan atau fenomena yang terjadi. Berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian:

1. Pendekatan/Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian termasuk pencarian fakta dari pertanyaan yang berbeda dengan tujuan dari penelitian tipe ini adalah guna memperoleh paparan faktual yang berkaitan dengan variabel penelitian menggambarkan keadaan yang penelitian

berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar ada serta berkaitan dengan penataan dan pengelolaan tata ruang kota Palembang dalam perspektif politik (studi pada rumah susun Palembang). Penelitian ini mendeskripsikan penataan dan pengelolaan tata ruang secara kualitatif yang berupa uraian kalimat-kalimat menekankan pada keaslian, tidak menolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi kepala dinas dan pejabat-pejabat di lingkungan dinas tata kota. Data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen tentang penataan kawasan rumah susun.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode:

a. Wawancara

Dalam metode ini peneliti dan responden secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang bisa menjelaskan masalah penelitian. Wawancara juga bertujuan untuk mendapatkan informasi secara terperinci, berupa

pendapat dan pengalaman yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu tentang penataan dan pengelolaan tata ruang kota Palembang dalam perspektif politik (studi pada rumah susun di Palembang). Pada wawancara ini peneliti mewawancarai, yaitu:

1. (Bidang Penataan Ruang) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang (Bapak Sajari)
2. Kelurahan 23 Ilir (Bapak Kms. Faisal)
3. Rw 2 Rusun Blok 06 (Bapak Subandi)
4. Perum Perumnas (Ibu Mira)
5. Warga Rusun (Ibu Desi Blok 13, Ibu Nanab Blok 07, Bapak Rudi Blok 50)

b. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi dibagi menjadi dua yaitu menyuguhkan informasi atau bukti resmi yang berguna untuk catatan sedangkan lainnya sebagai upaya mencatat yang mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto, video, dll. Jadi, pengertian dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti dan juga menyebarkannya kepada pihak kepentingan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Palembang provinsi Sumatera Selatan. Penetapan lokasi yang merupakan tahap sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan bisa ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitiannya, yang memiliki fokus pada menganalisis penataan dan pengelolaan tata ruang kota Palembang dalam perspektif politik (studi pada rumah susun di Palembang).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat tahapan dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, data tersebut berisi tentang wawancara secara langsung dengan ketua dan pejabat-pejabat di dinas tata kota dan dokumentasi dalam bentuk jurnal ilmiah, berita-berita yang berkaitan tentang penataan dan pengelolaan tata ruang kota Palembang dalam perspektif politik (studi pada rumah susun Palembang) dan hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian dicatat dan dikumpulkan.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakkan dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada dilapangan, bila proses ini dilakukan diakhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring. Pada tahap ini peneliti menyaring informasi yang didapat melalui wawancara dari informan.

c. Penyajian Data

Penyajian data berupa aktifitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan peneliti mengambil keputusan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh, penyajian data cenderung mengarah pada penyerdehanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami.

d. Analisa

Analisa merupakan suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentukannya atau penyusunannya untuk di kaji lebih lanjut.

e. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dalam analisa data mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang terdiri dari Pendekatan/metode penelitian, data dan sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, sistematika penulisan laporan.

BAB II Kajian Pustaka yang Relevan

Pada bab ini lebih fokus pada kajian dari berbagai pihak secara teoritis tentang fokus masalah yang diangkat. menjelaskan berbagai materi yang berkaitan dengan penataan dan pengelolaan tata ruang kota Palembang dalam perspektif politik (studi pada rumah susun di Palembang). Yang berfungsi untuk memberikan keluasan referensi dari si peneliti.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini membahas mengenai gambaran tentang profil kota Palembang , Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Palembang, perumahan, dan profil rumah susun kota Palembang.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan jawaban dari rumusan masalah, yaitu, penataan dan pengelolaan tata ruang kota Palembang dalam perspektif politik (studi pada rumah susun di Palembang).

BAB V Penutup

Dalam bab terakhir dalam penulisan skripsi ini menjelaskan kesimpulan serta saran yang didapatkan dari seluruh isi pembahasan skripsi yang diperoleh dari penelitian.